



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI SUPRIATONO PURNOMO**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **920210**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.435.912.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 114 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 285.912.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/91 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 286 m2/174 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/39 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/40 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
7. Tanah Seluas 109 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
8. Tanah Seluas 152 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 170.700.000

1. MOBIL, NISSAN ALL NEW LIVINA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000



2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
5.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 61.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 569.186.684

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.237.298.684

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.237.298.684

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.